**PENDIDIKAN KEBENCANAAN DI INDONESIA:
*LEAVE IT TO GEOGRAPHY!***

Ditulis oleh Nofrion
Dosen Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Email. dion_geografi@yahoo.com dan nofrion@fis.unp.ac.id
Ponsel dan WA : 081363310550

*Indonesia terletak diantara dua jalur pegunungan dunia dan berada dalam lingkup “ring of fire”, kita sudah tahu. Indonesia berada pada tiga titik pertemuan lempeng dunia, kita juga sering baca. Indonesia rawan bencana, informasi harian kita. Indonesia sering dilanda bencana itu faktanya. Indonesia siaga bencana?,
ITU PERMASALAHANNYA.*

Tahun 2018 saja, ribuan rakyat Indonesia kembali meregang nyawa karena bencana. Sebut saja, Gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah tanggal 28 September 2018 dengan korban meninggal lebih dari 2000 jiwa. Belum lagi korban akibat bencana Gempa Lombok tanggal 5 Agustus 2018 dan Bencana Tsunami Banten dan Lampung Selatan tanggal 22 Desember 2018. BNPB mencatat, pada tahun 2018 jumlah kejadian bencana tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Tahun 2016 terjadi 2.306 kejadian, tahun 2017 meningkat menjadi 2.392 kejadian dan tahun 2018 berada di atas angka 2000. Namun, dampak yang diakibatkan oleh kejadian bencana tahun 2018 adalah yang paling parah setelah kejadian bencana tahun 2007.

Fakta lainnya. Julukan sebagai laboratorium bencana dunia adalah pelajaran yang lambat kita pahami. Bencana demi bencana yang terjadi di Indonesia bukanlah kutukan yang datang sekonyong-konyong tapi sudah ada jejak dan sejarahnya. Kita yang lalai membacanya. Para ahli Geologi dan Arkeologi telah lama menemukan bukti tsunami purba di NAD. Peneliti juga telah mempelajari bahwa Gempa dan Tsunami Palu sudah pernah terjadi beberapa kali. Demikian juga dengan Gempa dan Tsunami di Kepulauan Mentawai dan Padang yang diakibatkan oleh pecahnya “megathrust” telah pernah terjadi tahun 1833 dan memiliki periode ulang 200 tahunan.

Selanjutnya, apa kita kekurangan lembaga dan ahli?. Bukankah kita punya BNPB, BMKG, PVMMG, BPPT, LIPI, BASARNAS dan di setiap daerah ada BPBP. Namun, kenapa tahun 2018 kita sepertinya “kecolongan” dengan Gempa dan Tsunami Palu, Sigi, Donggala dan Tsunami Banten dan Lampung selatan?. Alat hilang, alat rusak, pengaruh cuaca, bukan wilayah kerja lembaga tertentu, kekurangan dana?. Cukuplah ini alasan di tahun 2018.

Di tengah perhatian pasca Tsunami Banten dan Lampung Selatan serta curhat lembaga pengurus bencana karena anggaran yang semakin berkurang, Presiden RI, Ir. Joko Widodo mengeluarkan instruksi untuk menjadikan pendidikan kebencanaan sebagai bagian dari kurikulum di sekolah. Ini mulai disuarakan Presiden dua hari pasca Tsu- BLS (baca-Tsunami Banten dan Lampung Selatan) atau tepatnya 24 Desember 2018. Tiga hari setelah itu, mendikbud langsung menyahuti instruksi itu dengan menyatakan bahwa pendidikan kebencanaan akan menjadi bagian dari kurikulum di sekolah namun bukan dalam bentuk mata pelajaran dan tidak pula diintegrasikan ke dalam mata pelajaran tertentu tetapi menyatu dalam Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK) berupa program “*basic of life skills*” melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Sepertinya ini menjadi ide baru kemendikbud karena sejak Tsunami NAD tahun 2004 sudah ada Pendidikan Kebencanaan yang difokuskan pada 223 kabupaten dan kota di Indonesia. Lalu, tahun 2013 juga ada program pengintegrasian pendidikan kebencanaan ke dalam beberapa mata pelajaran?. Apa ide tahun 2018 ini adalah respon terhadap instruksi Presiden semata atau evaluasi dari kebijakan kemendikbud sebelumnya?. Satu lagi catatan penting bagi kita semua.

Sepertinya tidak bijak juga berlama-lama membahas kondisi betapa belum siapnya kita dalam mengantisipasi potensi bencana. Kalimat bijak mengatakan “*It is better to light a candle than curse the darkness*”. Tulisan ini tidak didasari semata karena penulis adalah pendidik Geografi tapi juga didasari oleh pengalaman dan pengamatan penulis sejak tahun 2004 di Kota Padang sebagai salah satu kota paling rawan bencana di Indonesia baik sebagai korban, relawan dan praktisi kebencanaan. Walaupun menjadi korban gempa 2007 dan 2009 dan tidak menerima hak sebagaimana mestinya, penulis aktif memimpin Relawan Gempa Sekolah Ceria bersama GKC UNP dan Tim Konseling Kak Seto. Berpindah-pindah di pedalaman Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah terparah tahun 2009 juga penulis jalani sebagai Relawan Gempa RRI Pelipur Lara. Tidak hanya itu, penulis juga aktif dalam kegiatan *Traumatic Healing* di bawah binaan Tim Psikologi Universitas Indonesia dan tahun 2012 – 2013, penulis adalah anggota tim penulis naskah Pengurangan Resiko Bencana/PRB Provinsi Sumatra Barat tahun 2012 – 2017. Artinya, dalam rentang waktu 2004 – 2018 cukuplah pelajaran yang bisa dijadikan acuan. Kini, penulis ingin meyalakan satu lilin lagi.

Ketika kita masih belum sepakat untuk membawa pendidikan kebencanaan ini kemana, dengan tegas penulis menyatakan “*Leave it to Geography*”.

Kenapa harus Geografi?. Berikut penulis sajikan alasannya.

Pertama.

Mari kita telaah kurikulum dengan membuka kembali Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Geografi SMA/MA. Disana dinyatakan bahwa kajian mengenai Dinamika Litoster, Dinamika Atmosfer serta Dinamika Hidrosfer dipelajari di kelas X semester II. Sekarang mari kita telusuri jenis bencana yang terjadi selama tahun 2018 yang dirilis BNPB. Bencana yang paling sering terjadi adalah bencana puting beliung (605 kejadian), banjir (506 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (353 kejadian), erupsi gunung api (55 kejadian), gelombang pasang dan abrasi (33 kejadian), gempa merusak (17 kejadian) dan Tsunami (1 kali kejadian). Data ini dipublikasikan BNPB tanggal 25 Oktober 2018. Tinggal kita tambahkan saja dengan bencana yang terjadi dalam rentang bulan November dan desember 2018. Simpulannya adalah, materi tentang potensi bencana-bencana tersebut sudah ada dalam kurikulum mata pelajaran Geografi dan sudah dipelajari siswa SMA/MA di kelas X. Perkara hanya dipelajari di kelompok Ilmu-ilmu sosial dan kelas lintas minat itu persoalan di luar kemampuan penulis. Mengapa tidak dikuatkan saja keberadaan mata pelajaran Geografi di sekolah?. Apakah kualitas SDM guru-guru Geografi tidak mampu?, adakah datanya?. Kalau memang iya, bukankah bisa diatasi dengan memberikan pelatihan intensif, melalui pendampingan dan kerja sama dengan LSM/NGO yang peduli dengan kesiapsiagaan bencana termasuk dengan lembaga atau institusi pemerintah terkait?. Tentu akan lebih baik jika pengambil kebijakan menyampaikan alasan kenapa Revitalisasi Geografi sebagai ujung tombak pendidikan kebencanaan di sekolah tidak terlaksana selama ini. Apapun alasannya, pahit sekalipun tentunya bisa menjadi cermin bagi seluruh pendidik Geografi di Indonesia untuk memperbaiki diri.

Kedua.

Dari sekian banyak mata pelajaran di SMA/MA, Geografi memiliki karakter spesifik dengan kajian keruangannya. Geografi bukan lagi mata pelajaran yang sekedar mendeskripsikan muka bumi. Bukan pula ilmu yang hanya berbicara tentang sungai

terpanjang, ibukota suatu negara dan letak suatu negara dimana?. Geografi saat ini sudah menjadi ilmu yang lebih fokus pada pembahasan “Why” dan “How” dan didukung oleh alat analisis berupa peta, SIG dan PJ. Mari kita lihat sebaran kejadian bencana tahun 2018 di Indonesia. Bencana terjadi di Sumatra, Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Provinsi langganan bencana berdampak besarpun bisa dipetakan. Artinya, disini diperlukan kajian berdasarkan ruang dan disinilah peran geografi sebagai ilmu yang mengkaji gejala-gejala di permukaan bumi (baik fisik maupun non fisik) serta interaksi keduanya dalam konteks keruangan. Kondisi ini harus diselaraskan dengan potensi bencana di setiap provinsi. Contoh, untuk siswa SMA/MA di Kota Padang maka perlu diperdalam pada materi Dinamika Litosfer dan Dinamika Hidrosfer karena ancaman terbesar adalah gempa dan Tsunami. Tidak hanya aspek pengetahuan semata tapi juga sikap dan keterampilan mereka. Bukan berarti pula siswa tidak diajarkan materi dan potensi bencana lain. Demikian juga dengan daerah lain yang disesuaikan dengan karakter potensi bencana masing-masing. Contoh lain adalah muatan materi Geografi pada KD Dinamika Atmosfer untuk siswa di provinsi Riau perlu mendapatkan materi dan keterampilan yang lebih dalam tentang potensi bencana kebakaran hutan dan lahan dibanding potensi bencana lain.

Ketiga.

Di Indonesia, ilmu geografi berkembang cukup pesat. Indonesia punya Fakultas Geografi, UGM sebagai mercusuar keilmuan geografi yang bisa bekerja sama dengan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan, ITB serta Departemen Geografi, UI. Indonesia juga memiliki 400an LPTK dan belasan diantaranya berstatus negeri sebagai pencetak calon guru geografi. Artinya, secara kelembagaan Indonesia memiliki sumber daya di bidang pendidikan yang cukup. Tinggal menjadikan semua komponen tersebut menjadi suatu sistem yang kuat untuk mendukung terciptanya Indonesia yang siaga bencana. Perlu kita ketahui bahwa, negara semaju Jepang saja masih kecolongan dengan kejadian gempa di negara mereka. Bencana Tsunami di Tohoki, Jepang tahun 2011. Ketinggian tsunami melebihi prediksi para ahli Jepang. Lalu, bagaimana dengan kita yang masih sedang mencari formula?, sedangkan datangnya bencana bisa terjadi kapan saja.

Tulisan ini, bisa saja dianggap sebagai ide sektoral karena berasal dari kalangan Geografi. Tapi setidaknya, jika kita mau mencoba kenapa tidak. Ibarat pepatah orang

minang “*lupo maingek an, talanjua langkah, bao suruik*” artinya, jika diantara kita ada yang lupa maka tulisan ini mencoba mengingatkan, jika kita terlanjur melangkah atau mengambil keputusan lain maka tidak ada salahnya untuk surut ke belakang (evaluasi dan introspeksi). Jujur, perasaan was-was dan kuatir sering menghantui penulis beserta keluarga karena tinggal di Kota Padang. Kota dengan hampir sejuta penduduknya dan hampir separohnya justru tinggal di zona merah bencana gempa dan tsunami. Jika sampai kita terlambat melakukan edukasi kepada masyarakat dan akhirnya mereka menjadi korban karena kebijakan kita yang kurang tepat, ini dosa siapa?, Terakhir, mari kita perhatikan data yang dirilis oleh *Worlds Most Literate Nation* (2006) yang mempublikasikan bahwa literasi kebencanaan Indonesia berada pada posisi 60 dari 61 negara yang disurvei. Semoga ke depan, Bangsa Indonesia meningkat literasi kebencanaannya dan terhindar dari berbagai bahaya dan bencana. Semua itu, harus tetap dibingkai dengan literasi agama agar setiap langkah dan kebijakan yang diputuskan di republik ini adalah kebijakan yang menyelamatkan dan bermanfaat. Bukan keputusan yang menyengsarakan dan membawa mudharat. Amiiin YRA.

Salam Geografi.